

**PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS
TERHADAP KUALITAS PENGUNGKAPAN
KEBERLANJUTAN DENGAN KOMITE *CORPORATE SOCIAL
RESPONSIBILITY* SEBAGAI VARIABEL MODERASI**

TESIS



Disusun Oleh:

MARIA ROSA MISTIKA WARASABON

12.22.00851

**PROGRAM PASCASARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA
YOGYAKARTA**

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI



Program Magister Akuntansi dan Magister Manajemen
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta

UJIAN TESIS

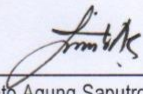
Tesis berjudul:

PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP KUALITAS PENGUNGKAPAN
KEBERLANJUTAN DENGAN KOMITE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI
VARIABEL MODERASI

Telah diuji pada tanggal: 8 Agustus 2024

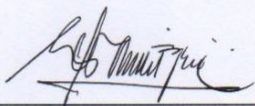
Tim Penguji:

Ketua



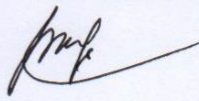
Dr. Julianto Agung Saputro, S.Kom., M.Si., Ak., CA., CRP.

Anggota



Dr. Efraim Ferdinan Giri, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Pembimbing



Dr. Nurofik, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

HALAMAN PENGESAHAN

PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP KUALITAS PENGUNGKAPAN KEBERLANJUTAN DENGAN KOMITE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL MODERASI

dipersiapkan dan disusun oleh:

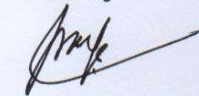
Maria Rosa Mistika Wara Sabon

Nomor Mahasiswa: 122200851

telah dipresentasikan di depan Tim Penguji pada tanggal: 8 Agustus 2024 dan dinyatakan telah memenuhi syarat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk mencapai gelar Magister Akuntansi (M.Ak.) di bidang Akuntansi

SUSUNAN TIM PENGUJI

Pembimbing



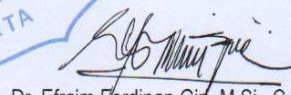
Dr. Nurofik, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Ketua Penguji

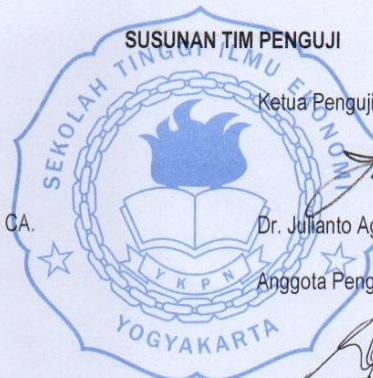


Dr. Julianto Agung Saputro, S.Kom., M.Si., Ak., CA., CRP

Anggota Penguji



Dr. Efraim Ferdinan Giri, M.Si., C.M.A., Ak., CA.



Yogyakarta, 8 Agustus 2024

Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN

Ketua,



Dr. Wisnu Prajogo, MBA.

HALAMAN KEASLIAN KARYA TULIS



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI

YAYASAN KELUARGA PAHLAWAN NEGARA YOGYAKARTA

JL. SETURAN, YOGYAKARTA 55281, P.O. BOX 1014 YOGYAKARTA 55010
TELP. (0274) 486160, 486321, FAKS. (0274) 486155 www.stieykpn.ac.id

Pernyataan Keaslian Karya Tulis Tesis

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya menyatakan bahwa tesis dengan judul:

PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP KUALITAS PENGUNGKAPAN KEBERLANJUTAN DENGAN KOMITE CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL MODERASI

diajukan untuk diuji pada tanggal 8 Agustus 2024, adalah hasil karya saya.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam tesis ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian karya tulis orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin, atau meniru dalam bentuk rangkaian kalimat atau simbol yang menunjukkan gagasan atau pendapat atau pemikiran dari penulis lain, yang saya akui seolah-olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru, atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya tanpa ada paksaan orang lain. Bila dikemudian hari terbukti bahwa saya ternyata melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain seolah-olah hasil pemikiran saya sendiri, maka saya bersedia menerima pembatalan gelar dan ijazah yang diberikan oleh Program Pascasarjana STIE YKPN Yogyakarta batal saya terima.

Saksi 1, sebagai Ketua Tim Penguji

Dr. Julianto Agung Saputro, S.Kom., M.Si., Ak., CA., CRP.

Saksi 2, sebagai Anggota Penguji

Dr. Efraim Ferdinan Giri, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Yogyakarta, 8 Agustus 2024

Yang memberi pernyataan

Maria Rosa Mistika Wara Sabon

Saksi 3, sebagai Pembimbing

Dr. Nurofik, M.Si., C.M.A., Ak., CA.

Saksi 4, sebagai Ketua STIE YKPN Yogyakarta

Dr. Wisnu Prajogo, MBA.

PENGARUH KARAKTERISTIK DEWAN KOMISARIS TERHADAP KUALITAS PENGUNGKAPAN KEBERLANJUTAN DENGAN KOMITE *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* SEBAGAI VARIABEL MODERASI

Maria Rosa Mistika Wara Sabon¹, Nurofik²
Program Magister Akuntansi
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memaparkan bukti empiris mengenai pengaruh karakteristik dewan komisaris yang diproksikan dengan dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris perempuan, frekuensi rapat dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan yang dimoderasi oleh komite CSR. Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman ringan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2021-2023. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* dengan kriteria yang ditentukan, sehingga diperoleh 22 perusahaan sebagai sampel. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan dewan komisaris perempuan berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan. Sedangkan dewan komisaris independen dan frekuensi rapat dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan. Selain itu, komite CSR sebagai variabel moderasi tidak mampu memperkuat pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.

Kata kunci: Karakteristik dewan komisaris, komite *Corporate Social Responsibility*, laporan keberlanjutan

ABSTRACT

The study aims to identify and expose empirical evidence on the impact of the characteristics of the council of commissioners projected with independent councils of Commissioners, the size of its council, female councillors, the frequency of its meetings on the quality of sustainability disclosure moderated by the CSR committee. The population of this study is a food and beverage subsector manufacturing company listed on the Indonesian Stock Exchange (BEI) for the period 2021-2023. The sampling technique in this study uses purposive samplings with specified criteria, thus obtaining 22 companies as samples. The results of this study show that the size of the board of commissioners and women's councils have a positive influence on the quality of sustainability disclosure. While independent councils and the frequency of council meetings have no influence on the quality of sustainability disclosure. However, the CSR committee as a moderation variable is unable to strengthen the impact of the board's characteristics on the quality of sustainability disclosure.

Keywords: *Characteristics of the Board of Commissioners, Corporate Social Responsibility committees, sustainability reports*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

PENDAHULUAN

Seiring perkembangan zaman, tuntutan terhadap perusahaan semakin meningkat. Fokus perusahaan bukan saja meningkatkan laba, tetapi juga harus memperhatikan dampak operasionalnya terhadap lingkungan serta tanggung jawab sosial. Banyak perusahaan yang saat ini berkembang menghadapi kritik karena menyebabkan kesenjangan sosial dan kerusakan lingkungan. Pemicu utamanya adalah munculnya fenomena seperti pencemaran lingkungan dan eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran (Heriansyah & Faradiza, 2023). Contoh kasus pencemaran lingkungan yang pernah terjadi yaitu PT. Unilever yang membuang limbah B3 di area perkebunan sehingga banyak ternak lokal yang mati. Kasus eksploitasi sumber daya alam yang pernah terjadi yaitu PT Vale Indonesia yang merusak hutan dan berdampak pada kelestarian flora dan fauna. Berbagai kasus yang terjadi merupakan bukti dari sikap egois dan ketidakpedulian perusahaan terhadap dampak bisnisnya.

Laporan keberlanjutan belakangan ini telah menjadi isu utama dan tren di kalangan perusahaan terutama terkait masalah penurunan emisi karbon dan persiapan untuk menghadapi perubahan iklim yang sedang menjadi isu sentral dalam agenda global, yang memunculkan tantangan baru bagi perusahaan di seluruh dunia (Kompas.com, 2024). Selain itu, laporan keberlanjutan juga digunakan untuk melaporkan kinerja ekonomi, sosial dan lingkungan kepada seluruh pemangku kepentingan selama periode tertentu. Hal ini mencerminkan bentuk tanggung jawab dan keterbukaan perusahaan atas aktivitas yang dilakukan. Laporan keberlanjutan menunjukkan kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sekitarnya serta tanggung jawab sosial. Laporan keberlanjutan adalah sarana untuk mengukur kinerja perusahaan dalam mewujudkan *triple bottom line*, serta menjadi tolok ukur bagi *stakeholder* lainnya dalam menelaah tanggung jawab sosial perusahaan. Di Indonesia, pengungkapan keberlanjutan awalnya bersifat sukarela, akan tetapi, pada tahun 2017, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengeluarkan aturan terkait pengungkapan keberlanjutan melalui POJK Nomor 51/pojk.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan untuk Lembaga Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan dalam mengungkapkan laporan keberlanjutan adalah *Good Corporate Governance* (GCG). Penerapan GCG harus didukung oleh struktur tata kelola perusahaan yang mencakup organ utama yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, Direksi, serta Komite Audit. Dewan Komisaris memiliki tugas untuk melakukan pengawasan umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada Direksi. Dewan komisaris merupakan entitas pengendalian internal tertinggi karena mereka mewakili pemegang saham dan bertanggung jawab langsung untuk mengawasi jalannya pengurusan perusahaan (Setiawan & Ridaryanto, 2021).

Dewan Komisaris memiliki karakteristik khusus, dimana istilah karakteristik mengacu pada ciri-ciri yang melekat pada individu seperti gender dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengetahuan (Setiawan & Ridaryanto, 2021). Dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris perempuan, serta frekuensi rapat dewan komisaris merupakan karakteristik dewan komisaris yang akan digunakan dalam penelitian.

Dewan komisaris independen berperan penting bagi transparansi informasi perusahaan. Tugas mereka mencakup pengawasan terhadap direksi, baik secara umum maupun khusus, serta berfungsi sebagai mediator untuk mencegah konflik kepentingan dengan pemegang saham (Jasman et al., 2023). Menurut POJK Nomor 51/POJK.03//2017 Pasal 19 ayat 2, proporsi komisaris independen minimal harus 30%. Jumlah komisaris yang besar dapat meningkatkan objektivitas dan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi selengkap mungkin melalui laporan keberlanjutan. Penelitian yang dilakukan (Heriansyah & Faradiza, 2023; Jasman et al., 2023; Wahyudi, 2021) menemukan dewan komisaris independen memiliki pengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan, sementara penelitian yang dilakukan oleh (Mujiani et al., 2021; Tobing et al., 2019) menemukan dewan komisaris independen tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan.

Ukuran dewan komisaris merupakan total komisaris yang ada pada sebuah organisasi, mencakup komisaris internal dan eksternal. Total anggota komisaris yang lebih besar dapat meningkatkan efisiensi pada sistem pelaporan dan mempermudah pengawasan terhadap kinerja manajemen (Kolsi & Muqattash, 2020). Ukuran dewan komisaris dinilai mempengaruhi proses pengawasan, pengambilan keputusan, dan keterbukaan. Penelitian yang dilakukan (Rahman et al., 2023; Trisnawati et al., 2022; Ederikat et al., 2020) menemukan ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Jasman et al., 2023; Kolsi & Muqattash, 2020) menemukan ukuran komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan.

Keberagaman gender dalam dewan komisaris mengacu pada keberadaan perempuan sebagai anggota dewan komisaris. Perempuan dan laki-laki memiliki nilai dan kualitas kepribadian yang berbeda, yang mungkin mempengaruhi cara mereka mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Perempuan lebih memilih untuk mengabaikan moralitas dan aturan karena mereka menghindari mengambil risiko saat mengambil keputusan (Rahman et al., 2023). Dewan komisaris perempuan sering dianggap lebih teliti, kritis, dan peka terhadap lingkungan sekitar. Hal ini dapat mengawasi kinerja manajemen dengan baik dan berpotensi mempengaruhi pengungkapan keberlanjutan (Esther & Petrus, 2021). Penelitian yang dilakukan oleh (Kolsi & Muqattash, 2020; Ederikat et al., 2020) menemukan dewan komisaris perempuan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan, sementara penelitian yang dilakukan oleh (Jasman et al., 2023; Setiawan & Ridaryanto, 2021) menemukan dewan komisaris perempuan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Interaksi antara anggota dewan komisaris dalam rapat yang diadakan sepanjang setahun sangat penting untuk mendukung pekerjaan pengawasan manajemen. Tingginya frekuensi pertemuan antar dewan komisaris menandakan kerja sama yang baik dan mampu untuk memfasilitasi terwujudnya GCG, sehingga dewan komisaris dianggap mampu menerbitkan kegiatan sosial perusahaan melalui pengungkapan keberlanjutan (Mohamed & Riham, 2020). Penelitian yang dilakukan (Setiawan & Ridaryanto, 2021) menemukan frekuensi rapat dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan, sementara penelitian yang dilakukan oleh (Trisnawati et al., 2022) menemukan frekuensi rapat dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan.

Komite CSR umumnya bertugas mengevaluasi kinerja dan kebijakan terkait isu tanggung jawab sosial dan usaha-usaha keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan. Pembentukan komite CSR dianggap sebagai mekanisme penting dalam tata kelola perusahaan (Jasman et al., 2023). Keterlibatan Komite CSR dapat dilihat sebagai sarana yang berguna untuk meningkatkan jangkauan dan kinerja pengungkapan keberlanjutan.

Berdasarkan uraian dari beberapa penelitian sebelumnya ditemukan adanya hasil penelitian yang tidak konsisten dari peneliti-peneliti sebelumnya, sehingga peneliti ingin menyelidiki lebih lanjut sejauh mana karakteristik dewan komisaris yang dilihat dari dewan komisaris independen, ukuran dewan komisaris, dewan komisaris perempuan, dan frekuensi rapat dewan komisaris dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Mengingat hubungannya dengan GCG, karakteristik ini mungkin berdampak pada pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Untuk keterbaruan penelitian ini peneliti menambahkan variabel moderasi, yaitu komite CSR yang bertugas mengawasi pengungkapan keberlanjutan dan inisiatif keberlanjutan perusahaan sebagai keterbaruan dari penelitian ini.

TINJAUAN TEORI

Agency Theory

Agency theory merupakan hubungan kontraktual antara pemilik atau pemegang saham (*principal*) dan manajer atau pekerja (*agen*) dalam sebuah perusahaan menurut Jensen dan Meckling (1976). Prinsipal mempekerjakan agen untuk mengelola aset atau sumber daya yang dimiliki oleh prinsipal serta dapat mengambil keputusan yang baik dan menguntungkan prinsipal. Keputusan-keputusan tersebut meliputi koordinasi antara unit-unit, alokasi sumber daya perusahaan, penetapan harga dan biaya, pengaturan kompensasi, dan pemberian insentif. Poin-poin utama dari teori keagenan menurut Jensen dan Meckling (1976): Konflik kepentingan (*agency conflict*), Biaya keagenan (*agency costs*), Struktur kepemilikan dan insentif, Kontrak keagenan.

Hubungan *agency theory* dengan laporan keberlanjutan yaitu laporan keberlanjutan berfungsi sebagai alat untuk mengurangi asimetri informasi dan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

konflik keagenan, dengan memberikan laporan yang transparan, akuntabilitas, dan kredibel. (Trisnawati et al, 2022). Salah satu komitmen manajemen untuk meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan serta merupakan bentuk transparansi perusahaan, dengan melaksanakan laporan keberlanjutan (Rahman et al., 2023).

Good Corporate Governance (GCG)

Menurut *Finance Committee on Corporate Governance*, tata kelola perusahaan merupakan kerangka kerja dan prosedur untuk mengelola aktivitas perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan serta tanggung jawab perusahaan (Wahyudi, 2021). GCG memiliki tujuan menciptakan kerangka kerja yang efektif untuk pengelolaan dan pengawasan perusahaan serta untuk memastikan bahwa perusahaan menjalankan kegiatan mereka dengan memperhatikan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, kewajaran, dan tanggung jawab sosial (Heriansyah & Faradiza, 2023). Inti dari GCG adalah meningkatkan performa perusahaan melalui kontrol dan pengamatan kinerja manajemen, serta meminta pertanggungjawaban manajemen kepada pemangku kepentingan (*stakeholder*) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Perusahaan mengungkapkan aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial kepada pemangku kepentingan sebagai bentuk akuntabilitasnya (Mujiani et al, 2021).

Dewan Komisaris Independen

Komisaris independen adalah individu yang tidak termasuk dalam manajemen, dan tidak memiliki hubungan dengan perusahaan. Diharapkan komisaris independen ini tidak dipengaruhi oleh manajemen, sehingga mereka bisa menggerakkan perusahaan untuk menyampaikan informasi lebih banyak dan membuat keputusan yang objektif tanpa pengaruh eksternal atau internal yang dapat menyebabkan konflik kepentingan. Adanya dewan komisaris independen dapat mendorong perusahaan untuk lebih aktif dalam berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, terutama melalui laporan keberlanjutan (Tobing et al, 2019).

Ukuran Dewan Komisaris

Ukuran dewan komisaris mencakup total keseluruhan anggota komisaris yang ada pada perusahaan, baik internal maupun eksternal. Dalam suatu perusahaan, dewan komisaris bertugas mengawasi tindakan manajemen puncak yang merupakan tingkat pengendalian internal tertinggi. Dewan komisaris, yang merupakan unit organisasi bertanggung jawab untuk mengawasi perusahaan, memberikan nasihat kepada direksi, dan penerapan GCG (KNKG, 2006).

Dewan Komisaris Perempuan

Dewan komisaris perempuan mengacu pada kehadiran perempuan dalam dewan komisaris suatu perusahaan. Keberadaan perempuan dalam dewan komisaris membawa perspektif yang berbeda-beda dalam pengambilan keputusan, karena pengalaman, latar belakang dan sikap perempuan yang lebih hati-hati dan cenderung menghindari risiko, serta lebih teliti dibandingkan laki-laki (Jasman et al, 2023). Dewan komisaris perempuan cenderung lebih memperhatikan aspek keberlanjutan, termasuk isu-isu sosial dan lingkungan serta dapat membantu

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perusahaan memperkuat komitmen mereka terhadap CSR (Kolsi & Muqattash, 2020).

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Frekuensi rapat dewan komisaris dilihat dari seberapa sering dewan komisaris bertemu untuk melakukan pertemuan resmi guna membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Rapat-rapat dewan komisaris biasanya dijadwalkan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan urgensi masalah-masalah yang perlu dibahas (Trisnawati et al., 2022). Tujuan rapat dewan komisaris adalah untuk memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap kegiatan perusahaan, memberikan arahan dan bimbingan kepada manajemen eksekutif, serta memastikan bahwa keputusan-keputusan strategis diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan dan para *stakeholder* (Setiawan & Ridaryanto, 2021).

Komite CSR

Komite CSR adalah sebuah badan atau kelompok yang bertanggung jawab atas pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan. Tugas utama komite CSR adalah merencanakan, mengawasi, dan melaksanakan program-program keberlanjutan yang selaras dengan tujuan perusahaan serta kebutuhan sosial dan lingkungan sekitarnya. Komite CSR memastikan bahwa perusahaan mematuhi prinsip-prinsip sosial, lingkungan dan etika dalam kegiatan operasionalnya (Tobing et al, 2019). Komite CSR memiliki kedudukan yang sama seperti komite audit yang membedakan hanya fokus pengawasannya, komite audit berfokus pada laporan keuangan sedangkan komite CSR berfokus pada usaha-usaha keberlanjutan.

Laporan Keberlanjutan

Menurut *Global Reporting Initiative* (GRI), laporan keberlanjutan adalah dokumen yang dikeluarkan perusahaan untuk menginformasikan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial dari aktivitas harian mereka. Laporan ini juga mencakup nilai-nilai, tata kelola perusahaan, serta model bisnis yang digunakan. Laporan keberlanjutan berdasarkan standar GRI mencakup informasi yang relevan dan material untuk pemangku kepentingan internal dan eksternal, serta memberikan panduan tentang bagaimana mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan dampak keberlanjutan. Laporan keberlanjutan yang dibuat sesuai dengan standar internasional GRI masih berkaitan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) dari PBB. Laporan tersebut tidak hanya memaparkan pencapaian perusahaan tetapi juga tantangan yang dihadapi dan langkah-langkah perbaikan yang direncanakan.

Pengembangan Hipotesis

Berdasarkan *agency theory*, dewan komisaris independen perlu menunjukkan independensi mereka saat mengawasi manajer, dan memverifikasi bahwa perusahaan telah beroperasi dengan baik. Tata kelola perusahaan yang diterapkan dengan tepat dapat mendorong perusahaan untuk melakukan penyampaian

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

informasi lebih banyak kepada prinsipal, salah satunya melalui laporan keberlanjutan. Anggota dewan yang independen cenderung lebih objektif dan mampu memberikan pengawasan yang lebih efektif terhadap manajemen. Dewan komisaris independen dapat mendorong transparansi dan pelaporan yang akurat mengenai inisiatif keberlanjutan. Penelitian yang dilakukan oleh Heriansyah & Faradiza. (2023); Jasman et al. (2023); Wahyudi. (2021); Ederikat et al. (2020) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen berpengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan. Sesuai dengan penjelasan yang telah diberikan, hipotesis pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H1: Dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.

Berdasarkan *agency theory*, ukuran dewan komisaris berperan dalam mengatasi konflik keagenan antara prinsipal dan agen. Besar kecilnya jumlah dewan komisaris dapat ditentukan berdasarkan jumlah anggotanya, ukuran dewan komisaris dinilai dapat mempengaruhi proses pengawasan, pengambilan keputusan, dan keterbukaan. Semakin besar jumlah anggota komisaris yang dimiliki perusahaan maka semakin mudah untuk mengawasi tugas manajemen dalam menjalankan usahanya dan semakin besar pula pihak manajemen menyampaikan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan. Hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. (2023); Setiawan & Ridaryanto. (2021); Ederikat et al. (2020) yang menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan. Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, hipotesis pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.

Berdasarkan *agency theory*, keberadaan perempuan dalam dewan komisaris dapat membantu mengurangi konflik keagenan melalui peningkatan kualitas pengawasan dan tata kelola perusahaan. Keberadaan perempuan dalam dewan komisaris sering kali dikaitkan dengan etika kerja yang lebih tinggi, kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan, dan transparansi yang lebih besar, yang semuanya mendukung tujuan prinsipal. Keberadaan perempuan dalam dewan komisaris membawa keberagaman perspektif, meningkatkan sensitivitas sosial dan etika, memperbaiki komunikasi dan hubungan dengan prinsipal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan norma sosial. Keberadaan komisaris perempuan dalam perusahaan dapat meningkatkan kualitas pengungkapan keberlanjutan. Semakin banyak komisaris perempuan dalam perusahaan dapat berkontribusi pada peningkatan jumlah indeks dalam pengungkapan keberlanjutan, karena mereka cenderung lebih fokus pada pencapaian non-finansial. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Ridaryanto. (2021); Ederikat et al. (2020) menunjukkan bahwa dewan komisaris perempuan berpengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan. Sesuai dengan penjelasan yang telah diberikan, hipotesis pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H3: Dewan komisaris perempuan berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.

Berdasarkan *agency theory*, frekuensi rapat dewan komisaris yang tinggi membantu memastikan manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal dan pemangku kepentingan, serta meningkatkan transparansi dan mengurangi konflik keagenan antara dewan komisaris, direksi dan manajemen. Rapat dewan komisaris diagendakan secara berkala sesuai dengan permasalahan yang perlu dibahas dan memastikan bahwa kepentingan berbagai prinsipal dan pemangku kepentingan diakomodasi dalam strategi dan operasi perusahaan, yang mendukung keberlanjutan dan reputasi perusahaan. Manajemen memiliki banyak kesempatan untuk menganalisis rencana strategis masa depan perusahaan, ketika dewan komisaris sering mengadakan rapat. Dengan demikian, diharapkan fungsi pengawasan menjadi lebih optimal, yang berpotensi meningkatkan cakupan pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Studi yang dilakukan oleh Trisnawati et al.(2022); Setiawan & Ridaryanto. (2021) menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan keberlanjutan. Sesuai dengan penjelasan yang telah diberikan, hipotesis pada penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H4: Frekuensi rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.

Berdasarkan *agency theory*, komite CSR merupakan bagian dari tata kelola perusahaan yang mempunyai tugas untuk memastikan bahwa perusahaan bertindak sesuai dengan nilai-nilai etika dan tanggung jawab sosial, dan memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan jangka panjang pemegang saham (*principal*) dan pemangku kepentingan. Adanya komite CSR dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan dan pelaksanaan kegiatan CSR perusahaan. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip *agency theory* yang menekankan pentingnya pengawasan untuk meminimalkan konflik keagenan. Komite CSR bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan CSR disusun secara jujur dan akurat, serta menyediakan informasi yang transparan kepada prinsipal dan pemangku kepentingan lainnya mengenai kinerja sosial serta lingkungan perusahaan. Saat ini banyak perusahaan yang memiliki komite CSR untuk membantu dewan komisaris melakukan pengawasan terhadap pengungkapan keberlanjutan dan usaha-usaha keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan. Komite CSR bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja dan kebijakan mengenai isu-isu terkait CSR dan keberlanjutan. (Ederikat et al, 2020). Keterlibatan Komite CSR dapat dilihat sebagai sarana yang berguna untuk meningkatkan mekanisme tata kelola untuk mengembangkan kinerja pengungkapan keberlanjutan. Berdasarkan penjelasan yang telah diberikan, hipotesis pada penelitian dirumuskan sebagai berikut:

H5: Komite CSR memperkuat pengaruh dewan komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.

H6: Komite CSR memperkuat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

H7: Komite CSR memperkuat pengaruh dewan komisaris perempuan terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.

H8: Komite CSR memperkuat pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder. Data sekunder yang digunakan adalah laporan tahunan dan laporan keberlanjutan dari perusahaan subsektor makanan dan minuman ringan yang terdaftar di BEI tahun 2021-2023. Informasi ini didapat dari situs resmi BEI yaitu (www.idx.co.id) dan dari website masing-masing perusahaan. Ruang lingkup penelitian ini mencakup variabel-variabel yang berkaitan dengan karakteristik dewan komisaris, komite CSR dan laporan keberlanjutan.

Dewan komisaris independen diukur menggunakan proporsi jumlah dewan komisaris independen dan jumlah seluruh anggota dewan komisaris (Wahyudi, 2021).

$$\text{Dewan Komisaris Independen} = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris independen}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$$

Ukuran dewan komisaris merupakan total semua anggota dewan komisaris pada perusahaan (Setiawan & Ridaryanto, 2021).

$$\text{Ukuran Dewan Komisaris} = \Sigma \text{ anggota dewan komisaris}$$

Kehadiran perempuan dalam dewan komisaris merupakan salah satu tanda adanya keberagaman gender dalam dewan komisaris (Rahman et al., 2023).

$$\text{Dewan Komisaris Perempuan} = \frac{\text{Jumlah dewan komisaris perempuan}}{\text{Jumlah anggota dewan komisaris}}$$

Frekuensi rapat dewan komisaris didefinisikan sebagai jumlah rapat dewan komisaris yang diselenggarakan dalam satu tahun (Trisnawati et al., 2022).

$$\text{Frekuensi rapat dewan komisaris} = \Sigma \text{ Rapat dewan komisaris pertahun}$$

Pengungkapan keberlanjutan diukur melalui indeks yang dikenal sebagai *Sustainability Report Disclosure Index* (SRDI), yang dikeluarkan oleh GRI. Indeks ini mencakup 91 kriteria terkait tanggung jawab perusahaan dalam bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial. Pengukuran SRDI dilakukan dengan mengumpulkan jumlah item yang diungkapkan oleh setiap perusahaan dalam laporan keberlanjutannya. Rumus untuk menghitung SRDI adalah sebagai berikut:

$$\text{SRDI} = N/K$$

N = Jumlah item yang diungkapkan

K = Jumlah item yang diharapkan (91 item)

Komite CSR sebagai variabel moderasi mempunyai tugas untuk melakukan pengawasan terhadap pengungkapan keberlanjutan dan usaha-usaha keberlanjutan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

perusahaan (Jasman et al, 2023). Kehadiran komite CSR diukur dengan menggunakan *dummy*. Jika perusahaan mempunyai komite CSR maka diberi nilai 1 dan jika tidak mempunyai komite CSR diberi nilai 0.

Metode analisis yang digunakan untuk menguji hipotesis adalah *Moderated regression analysis* (MRA) dengan menggunakan perangkat lunak IBM SPSS Statistics 29. Model persamaan analisis regresi moderasi dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \beta_5 Z + \beta_6 X_1 Z + \beta_7 X_2 Z + \beta_8 X_3 Z + \beta_9 X_4 Z + e$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Deskriptif

Hasil pengujian statistik deskriptif dapat ditemukan dalam Tabel 1

Tabel 1. Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
LK	66	0,18	0,92	0,4013	0,1288
DKI	66	0,3	0,8	0,3879	0,1060
UDK	66	2	8	3,77	1,586
DKP	66	0,0	0,6	0,117	0,1974
FRDK	66	3	12	6,09	1,689
KOMITE CSR	66	0,0	1	0,1061	0,3102
Valid N (listwise)	66				

Catatan: LK= Laporan Keberlanjutan, DKI= Dewan Komisaris Independen, UDK = Ukuran Dewan Komisaris, DKP= Dewan Komisaris Perempuan, FRDK= Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

Berdasarkan tabel hasil analisis deskriptif tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris Independen (DKI) dari data tersebut mempunyai nilai rata-rata sebesar 0,3879 dan standar deviasi sebesar 0,1060.
2. Rata-rata nilai Ukuran Dewan Komisaris (UDK) dari data tersebut sebesar 3,77 dengan standar deviasi sebesar 1,586.
3. Dewan Komisaris Perempuan (DKP) dari data tersebut memperoleh nilai rata-rata sebesar 0,117 dengan standar deviasi sebesar 0,1974.
4. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris (FRDK) dari data tersebut memiliki nilai rata-rata sebesar 6,09 dengan standar deviasi sebesar 1,689.
5. Komite CSR pada penelitian ini mendapatkan nilai rata-rata sebesar 0,1061 dengan standar deviasi sebesar 0,3102.
6. Laporan Keberlanjutan (LK) dari data tersebut memiliki nilai rata-rata sebesar 0,4013 dan standar deviasi sebesar 0,1288.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas

**Tabel 2. Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		66
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0,0000000
	Std. Deviation	0,12308268
Most Extreme Differences	Absolute	0,101
	Positive	0,101
	Negative	-0,071
Test Statistic		0,101
Asymp. Sig. (2-tailed) ^c		0,090 ^d

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Model regresi dalam penelitian ini berdistribusi normal, berdasarkan uji normalitas pada Tabel 2. Dapat dijelaskan bahwa nilai signifikansi *Asymp sig. (2-tailed)* sebesar 0,090 lebih besar dari 0,05.

Uji Multikolinearitas

Tabel 3. Uji Multikolinearitas

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	0,242	0,085		2,853	0,006		
	DKI	-0,003	0,156	-0,002	-0,017	0,987	0,904	1,106
	UDK	0,011	0,011	0,134	1,034	0,305	0,892	1,121
	DKP	-0,077	0,085	-0,119	-0,910	0,367	0,879	1,137
	FRDK	0,021	0,010	0,275	2,116	0,038	0,885	1,130
	KOMITE	-0,015	0,029	-0,287	-1,670	0,025	0,907	1,125
	CSR							

a. Dependent Variable: LK

Catatan: DKI= Dewan Komisaris Independen, UDK = Ukuran Dewan Komisaris, DKP= Dewan Komisaris Perempuan, FRDK= Frekuensi Rapat Dewan Komisaris

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tabel 3 menunjukkan nilai dari hasil pengujian multikolinearitas, semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai TOL > 0,1 dan VIF < 10. Maka disimpulkan bahwa seluruh variabel tersebut tidak terjadi multikolinearitas

Uji Heteroskedastisitas

Hasil pengujian heteroskedastisitas ditemukan dalam tabel berikut:

Tabel 4. Uji Heteroskedastisitas

Model		Coefficients		Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
		Unstandardized Coefficients B	Std. Error			
1	(Constant)	0,204	0,054		3,793	0,000
	DKI	-0,101	0,094	-0,132	-1,066	0,291
	UDK	0,007	0,006	0,129	0,040	0,302
	DKP	-0,144	0,051	-0,351	-2,806	0,107
	FRDK	-0,005	0,007	-0,111	-0,805	0,424
	KOMITE CSR	0,016	0,035	0,060	0,445	0,658

a. Dependent Variable: ABS_RES

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas pada tabel di atas, semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini memiliki nilai signifikansi yang lebih tinggi dari 0,05. Maka disimpulkan bahwa seluruh variabel tersebut tidak memiliki gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Hasil pengujian autokorelasi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 5. Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0,295 ^a	0,087	0,087	0,1270	1,972

a. Predictors: (Constant), KOMITE CSR, FRDK, DKI, DKP, UDK

b. Dependent Variable: LK

Berdasarkan hasil uji Durbin Watson (DW) dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah autokorelasi, yang terlihat dari nilai DW 1,972, di mana nilai $1,4758 < DW < 2,2681$.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Moderated Regression Analysis (MRA)

**Tabel 6. Koefisien MRA
Coefficients**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0,182	0,106		1,726	0,199
	DKI	-0,051	0,157	-0,042	-0,324	0,747
	UDK	0,034	0,015	0,449	2,336	0,023
	DKP	0,030	0,090	0,045	2,285	0,002
	FRDK	0,009	0,011	0,112	0,863	0,392
	KOMITE CSR	-0,024	0,022	-1,892	-1,098	0,128
	X1Z	1,314	0,824	1,422	1,594	0,116
	X2Z	0,002	0,095	0,017	0,021	0,984
	X3Z	0,296	1,128	0,241	0,262	0,794
	X4Z	-0,078	0,059	-1,708	-1,334	0,187

a. Dependent Variable: LK

Berikut ini hasil persamaan *Moderated Regression Analysis* yang diperoleh, yaitu

$$Y = 0,182 - 0,051x_1 + 0,034x_2 + 0,030x_3 + 0,009x_4 + 1,314x_{1z} + 0,002x_{2z} + 0,296x_{3z} - 0,078x_{4z} + 0,106$$

Uji Hipotesis

Uji Model (F)

Tabel 7. Uji Model

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0,188	8	0,024	3,507	0,007 ^b
	Residual	0,890	57	0,016		
	Total	1,079	65			

a. Dependent Variable: LK

b. Predictors: (Constant), X4Z, UDK, DKI, DKP, KOMITE CSR, X3Z, X2Z, FRDK, X1Z

Model dalam penelitian ini sudah tepat untuk digunakan, berdasarkan hasil uji f dalam Tabel 7 menjelaskan nilai F-hitung yang diperoleh sebesar 3,507 lebih tinggi dari nilai F-tabel sebesar 2,52 dengan tingkat signifikansi 0,007 yang kurang dari

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

0,05. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini telah tepat digunakan.

Koefisien Determinasi (R²)

Tabel 8. Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0,418 ^a	0,359	0,175	0,1249

a. Predictors: (Constant), X4Z, UDK, DKI, DKP, KOMITE CSR, X3Z, X2Z, FRDK, X1Z

Tabel di atas menjelaskan bahwa nilai Adjusted R Square yang didapatkan sebesar 0,175, yang diinterpretasikan bahwa dari 17,5% variasi dalam kualitas pengungkapan keberlanjutan dapat dijelaskan oleh variabel komisaris independen, ukuran komisaris, komisaris perempuan, frekuensi rapat komisaris, dengan dimoderasi oleh komite CSR, Sementara itu, 82,5% variasi lainnya dipengaruhi oleh variabel yang tidak terdapat dalam model penelitian ini.

Uji T

Tabel 9. Hasil Uji Hipotesis

	Hasil	Tingkat Sig	Kesimpulan
H1	0,747	0,05	Tidak Didukung
H2	0,023	0,05	Didukung
H3	0,002	0,05	Didukung
H4	0,392	0,05	Tidak Didukung
H5	0,116	0,05	Tidak Didukung
H6	0,984	0,05	Tidak Didukung
H7	0,794	0,05	Tidak Didukung
H8	0,187	0,05	Tidak Didukung

Pembahasan

Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kualitas Pengungkapan Keberlanjutan

Dewan komisaris independen adalah anggota komisaris yang bukan bagian dari manajemen, atau pejabat yang memiliki hubungan dengan perusahaan. Dewan komisaris independen seharusnya tidak terpengaruh oleh manajemen sehingga dapat memberikan lebih banyak laporan serta membuat penilaian dengan objektif dan bebas dari pengaruh internal maupun eksternal yang dapat menimbulkan konflik kepentingan. Semakin banyak informasi yang disampaikan kepada

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pemangku kepentingan melalui laporan keberlanjutan, menunjukkan keberadaan dewan komisaris independen sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Temuan penelitian ini tidak dapat menjawab permasalahan penelitian, yaitu dewan komisaris independen tidak memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.

Tidak berpengaruhnya dewan komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan diduga disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, dewan komisaris independen belum melaksanakan tugas serta fungsinya secara maksimal. Meskipun ada dewan komisaris independen, jika mereka tidak memiliki cukup waktu untuk perusahaan karena terlibat dalam kegiatan lain, maka peran mereka tidak akan efektif. Kedua, kualitas anggota dewan komisaris independen. Dalam pengambilan keputusan, keahlian dewan komisaris sangat penting. Oleh karena itu, keterampilan, pengetahuan, dan latar belakang pendidikan komisaris independen harus dipertimbangkan selain komposisi mereka. Hal ini dapat meningkatkan kualitas pengambilan keputusan pada tingkat dewan komisaris, termasuk keputusan mengenai pengungkapan keberlanjutan. Ketiga, sikap independensi dewan komisaris independen. Karena beberapa anggota dewan komisaris independen tidak dapat menunjukkan sikap independen, akibatnya fungsi pengawasan tidak berjalan dengan efektif serta manajemen tidak terdorong untuk mengungkapkan informasi keberlanjutan.

Temuan penelitian ini bertentangan dengan *agency theory* yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen sebagai bagian dari mekanisme internal bertanggung jawab untuk mengawasi tindakan manajemen dalam mendorong transparansi dan pengungkapan keberlanjutan yang berkualitas. Dewan komisaris independen harus menunjukkan sikap independen saat mengawasi manajemen, memberikan arahan kepada dewan direksi, serta memverifikasi bahwa perusahaan telah mengikuti praktik tata kelola perusahaan yang tepat. Penerapan GCG yang baik akan menggerakkan perusahaan agar menyampaikan lebih banyak informasi kepada prinsipal, salah satunya melalui laporan keberlanjutan.

Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Mujiani et al. (2021); Tobing et al. (2019) yang menyatakan bahwa dewan komisaris independen yang memiliki sikap independensi tidak menjamin anggota komisaris tersebut dapat mendukung pengawasan terhadap manajemen dalam pengungkapan keberlanjutan.

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan Keberlanjutan

Ukuran dewan komisaris adalah total keseluruhan anggota komisaris pada perusahaan, baik internal maupun eksternal. Dalam suatu perusahaan dewan komisaris bertugas mengawasi tindakan manajemen dalam kegiatan operasional perusahaan, dan penerapan GCG. Besar kecilnya jumlah dewan komisaris dapat ditentukan berdasarkan jumlah anggotanya. Ukuran dewan komisaris dinilai dapat mempengaruhi proses pengawasan, pengambilan keputusan, dan keterbukaan. Perusahaan semakin mudah untuk mengawasi tugas manajemen ketika menjalankan usahanya, ketika perusahaan memiliki jumlah dewan komisaris yang banyak, sehingga laporan keberlanjutan perusahaan terkait pelaksanaan tanggung

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

jawab sosial semakin lengkap. Temuan penelitian ini dapat menjawab permasalahan penelitian, yaitu ukuran dewan komisaris dapat memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.

Temuan ini sesuai dengan *agency theory* yang menjelaskan bahwa dewan komisaris mempunyai tugas untuk mengawasi tindakan manajemen dalam menjalankan bisnis perusahaan termasuk kebijakan keberlanjutan sehingga dapat mengurangi konflik keagenan dan dapat memberikan laporan yang transparan, akuntabilitas, dan kredibel. Laporan keberlanjutan yang diungkapkan oleh perusahaan berfungsi untuk meningkatkan kinerja sosial dan lingkungan serta merupakan bentuk transparansi perusahaan kepada prinsipal dan pemangku kepentingan lainnya.

Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Rahman et al. (2023); Setiawan & Ridaryanto. (2021); Ederikat et al. (2020) yang menemukan bahwa ukuran dewan komisaris yang besar akan memudahkan dewan komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas dan program keberlanjutan yang dilakukan oleh perusahaan.

Pengaruh Dewan Komisaris Perempuan terhadap Kualitas Pengungkapan Keberlanjutan

Dewan komisaris perempuan mengacu pada kehadiran perempuan dalam dewan komisaris suatu perusahaan. Hal ini menunjukkan keberagaman gender dalam struktur pengambilan keputusan. Keberadaan perempuan dalam dewan komisaris membawa keberagaman perspektif yang berbeda dalam pengambilan keputusan, meningkatkan sensitivitas sosial dan etika, memperbaiki komunikasi dan hubungan dengan prinsipal, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan norma sosial. Keberadaan dewan komisaris perempuan dalam perusahaan dapat meningkatkan kualitas dari pengungkapan keberlanjutan. Semakin banyak komisaris perempuan akan berdampak pada peningkatan skor atau jumlah indeks dalam pengungkapan keberlanjutan yang dilaporkan oleh perusahaan, karena dewan komisaris perempuan dinilai lebih berfokus pada pencapaian non-finansial. Temuan penelitian ini dapat menjawab permasalahan penelitian, yaitu dewan komisaris perempuan dapat memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.

Temuan penelitian ini sejalan dengan *agency theory* yang menjelaskan bahwa keberadaan perempuan dalam dewan komisaris dapat membantu mengurangi konflik keagenan melalui peningkatan pengawasan dan menciptakan tata kelola yang baik. Keberadaan perempuan dalam dewan komisaris sering kali dikaitkan dengan etika kerja yang lebih tinggi, kepatuhan yang lebih baik terhadap peraturan, dan transparansi yang lebih besar. Dewan komisaris perempuan sering terlibat dalam pengawasan manajemen agar bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal juga pemangku kepentingan, strategi perusahaan, serta kebijakan keberlanjutan yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan perusahaan.

Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Setiawan & Ridaryanto. (2021); Ederikat et al. (2020) yang menunjukkan bahwa keberadaan perempuan dalam jajaran komisaris dinilai mampu meningkatkan fungsi

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

pengawasan terhadap manajemen, karena dewan komisaris perempuan dianggap lebih teliti, kritis, dan peka terhadap aspek keberlanjutan yaitu sosial dan lingkungan sekitar.

Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan Keberlanjutan

Frekuensi rapat dewan komisaris mengacu pada seberapa sering dewan komisaris sebuah perusahaan bertemu untuk melakukan pertemuan resmi guna membahas berbagai masalah yang berkaitan dengan pengawasan dan pengelolaan perusahaan. Rapat-rapat dewan komisaris biasanya dijadwalkan secara berkala sesuai dengan kebutuhan dan urgensi masalah-masalah yang perlu dibahas. Tujuan dari frekuensi rapat dewan komisaris adalah untuk memastikan adanya pengawasan yang efektif terhadap kegiatan perusahaan, memberikan arahan dan bimbingan kepada manajemen, serta memastikan bahwa keputusan-keputusan strategis diambil dengan mempertimbangkan kepentingan jangka panjang perusahaan. Temuan penelitian ini tidak dapat menjawab permasalahan penelitian, yaitu frekuensi rapat dewan komisaris tidak memberikan pengaruh positif terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.

Tidak berpengaruhnya frekuensi rapat dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan diduga karena beberapa alasan. Pertama, banyak topik yang harus dibahas dalam rapat dewan komisaris seperti kinerja keuangan, strategi bisnis, risiko yang dihadapi perusahaan, kepatuhan dan regulasi. Dengan banyak topik yang dibahas, isu atau topik terkait keberlanjutan mungkin tidak mendapatkan perhatian yang cukup, meskipun frekuensi rapat dewan komisaris tinggi. Kedua, adanya anggota komisaris yang mendominasi dalam rapat komisaris dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan perusahaan sehingga dinilai kurang efisien. Ketiga, komitmen dan kompetensi anggota dewan komisaris dalam isu-isu keberlanjutan. Jika dewan komisaris tidak memiliki pengetahuan atau kepedulian yang cukup tentang keberlanjutan, rapat yang sering dilakukan tidak akan meningkatkan pengungkapan keberlanjutan.

Temuan penelitian ini bertentangan dengan *agency theory* yang menjelaskan bahwa rapat dewan komisaris sebagai media komunikasi dan koordinasi antara anggota-anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen dan memastikan bahwa kepentingan berbagai prinsipal dan pemangku kepentingan telah diakomodasi dalam strategi dan operasi perusahaan, yang mendukung pengungkapan keberlanjutan perusahaan. Frekuensi rapat dewan komisaris yang tinggi memainkan peran penting dalam mengurangi konflik keagenan antara dewan komisaris, direksi dan manajemen, serta meningkatkan transparansi.

Temuan ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Trisnawati et al. (2022); Setiawan & Ridaryanto. (2021) yang menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan komisaris yang tinggi tidak menjamin topik terkait kebijakan dan kinerja keberlanjutan dibahas, karena dalam rapat dewan komisaris banyak topik yang dibahas dan lebih mengutamakan topik yang berkaitan dengan kinerja keuangan

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

dan operasional perusahaan. Topik keberlanjutan dianggap kurang penting untuk dibahas.

Komite CSR Memoderasi Pengaruh Dewan Komisaris Independen terhadap Kualitas Pengungkapan Keberlanjutan

Keberadaan komite CSR pada perusahaan mempunyai tugas utama untuk merencanakan, mengawasi, serta melaksanakan program-program CSR yang sesuai dengan tujuan perusahaan dan aturan, nilai atau norma yang berlaku pada masyarakat. Perusahaan yang memiliki komite CSR dapat mempengaruhi komisaris independen dalam mengawasi aktivitas keberlanjutan serta pengungkapan keberlanjutan perusahaan dengan objektif. Hasil dari penelitian ini tidak dapat menjawab permasalahan penelitian, yang menunjukkan bahwa komite CSR tidak dapat memperkuat pengaruh dewan komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.

Tidak berpengaruhnya komite CSR dalam memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan diduga karena beberapa alasan. Pertama, fokus yang berbeda antara komisaris independen dan komite CSR. Dewan komisaris independen lebih fokus dengan aspek keuangan dan operasional perusahaan, seperti profitabilitas, risiko, dan kepatuhan regulasi. Sementara itu, komite CSR lebih berfokus pada dampak sosial dan lingkungan, yang mungkin tidak selalu terlihat langsung dalam laporan keuangan. Kedua, kompetensi dan pengalaman komite CSR mempunyai peran penting dalam pengungkapan keberlanjutan. Komite CSR harus memiliki latar belakang atau pemahaman yang baik tentang keberlanjutan agar dapat menyampaikan usaha-usaha keberlanjutan dengan jelas. Apabila komite CSR tidak dapat menyampaikan usaha-usaha keberlanjutan perusahaan dengan jelas maka tidak dapat mempengaruhi dewan komisaris. Ketiga, adanya keterbatasan wewenang, komite CSR tidak memiliki wewenang dalam pengambilan keputusan terkait kebijakan keberlanjutan. Komite CSR hanya dapat memberikan rekomendasi, tetapi keputusan akhir tetap berada pada dewan komisaris.

Komite CSR Memoderasi Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan Keberlanjutan

Komite CSR dapat membantu dewan komisaris perusahaan dalam mengelola tanggung jawab sosialnya, memperkuat hubungan dengan pemangku kepentingan serta berkontribusi terhadap masyarakat dan lingkungan tempat mereka beroperasi. Akan tetapi tidak semua perusahaan mempunyai komite CSR, Karena komite CSR dibentuk secara sukarela untuk menjalankan program CSR yang telah dibuat (Endrikat et al. 2020). Komisaris yang jumlahnya besar dapat mempermudah pengawasan pada manajemen dalam melaporkan pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan yang dilaporkan dalam laporan keberlanjutan. Dewan komisaris yang besar juga dapat memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan kebijakan keberlanjutan. Hasil dari penelitian ini tidak dapat menjawab permasalahan penelitian, yang menunjukkan bahwa komite CSR dapat memperkuat pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Tidak berpengaruhnya komite CSR dalam memoderasi pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan diduga karena beberapa alasan. Pertama, pelaksanaan program CSR perusahaan dilakukan oleh dewan komisaris lainnya, sehingga fungsi atau kehadiran komite CSR tidak dapat mempengaruhi perusahaan dalam kegiatan dan pengungkapan keberlanjutan. Kedua, kurangnya koordinasi antara komite CSR dan dewan komisaris, jumlah dewan komisaris yang banyak dalam perusahaan, tidak menjamin bahwa koordinasi antara dewan komisaris dan komite CSR dapat tercipta dengan baik, karena komite CSR yang bekerja secara terpisah dari dewan komisaris sehingga memiliki interaksi yang terbatas dan berakibat pada koordinasi yang kurang baik.

Komite CSR Memoderasi Pengaruh Dewan Komisaris Perempuan terhadap Kualitas Pengungkapan Keberlanjutan

Perusahaan yang memiliki komite CSR mempunyai tugas untuk membantu perusahaan dalam melakukan pengawasan terhadap aktivitas keberlanjutan perusahaan. Keberadaan perempuan dalam dewan komisaris dapat mendorong gaya kepemimpinan yang lebih inklusif dan kolaboratif. Hal ini mengarah pada kerjasama yang lebih baik antara komite CSR dan dewan komisaris dalam implementasi inisiatif keberlanjutan yang lebih efektif. Dewan komisaris perempuan lebih cenderung memperhatikan isu sosial, lingkungan, serta etika, yang relevan dengan aktivitas keberlanjutan. Hasil dari penelitian ini dapat menjawab permasalahan penelitian, yang menunjukkan bahwa komite CSR tidak dapat memperkuat pengaruh dewan komisaris perempuan terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan.

Tidak berpengaruhnya komite CSR dalam memoderasi pengaruh dewan komisaris independen terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan diduga karena beberapa alasan. Pertama, perspektif dan pengalaman yang berbeda, komite CSR mungkin lebih berfokus pada inisiatif jangka pendek dan proyek-proyek spesifik tanpa integrasi penuh dengan strategi bisnis. Sedangkan dewan komisaris perempuan mungkin memiliki perspektif yang lebih strategis dan jangka panjang terhadap keberlanjutan. Kedua, otoritas yang terbatas komite CSR memiliki peran penting dalam melaksanakan kebijakan CSR, tetapi mungkin tidak memiliki otoritas yang cukup untuk mempengaruhi kebijakan strategis atau laporan keberlanjutan secara keseluruhan.

Komite CSR Memoderasi Pengaruh Frekuensi Rapat Dewan Komisaris terhadap Kualitas Pengungkapan Keberlanjutan

Komite CSR berkaitan erat dalam kerangka tata kelola perusahaan yang berorientasi pada keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Komite CSR memiliki kedudukan yang sama dengan komite audit yang membedakan hanya fokus pengawasannya, komite audit lebih fokus pada laporan keuangan sedangkan komite CSR berfokus pada kebijakan dan kinerja-kinerja keberlanjutan. Rapat dewan komisaris yang diadakan oleh dewan komisaris membahas banyak topik serta kendala-kendala yang dialami oleh perusahaan dalam menjalankan bisnis, salah

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

satu topik yang dibahas yaitu tentang keberlanjutan perusahaan. Semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, semakin banyak kesempatan yang tersedia bagi manajemen untuk menganalisis rencana strategis masa depan perusahaan. Dengan demikian, diharapkan semakin baik fungsi pengawasan komite CSR terhadap pengungkapan keberlanjutan yang diungkapkan oleh perusahaan. Hasil dari penelitian ini tidak dapat menjawab permasalahan penelitian, yang menunjukkan bahwa komite CSR tidak dapat memperkuat pengaruh positif dari frekuensi rapat dewan komisaris terhadap kualitas laporan keberlanjutan.

Tidak berpengaruhnya komite CSR dalam memoderasi pengaruh frekuensi rapat dewan komisaris terhadap pengungkapan keberlanjutan diduga karena beberapa alasan. Pertama, fokus tanggung jawab yang berbeda, dewan komisaris memiliki tanggung jawab yang luas mencakup seluruh aspek tata kelola perusahaan, termasuk keuangan, operasional, strategi bisnis, risiko, dan kepatuhan. Sedangkan komite CSR fokus pada tanggung jawab sosial dan keberlanjutan perusahaan. Karena itu, agenda rapat dewan komisaris lebih beragam dan tidak hanya berkisar pada isu CSR dan keberlanjutan saja. Kedua, adanya keterbatasan wewenang, komite CSR tidak memiliki wewenang untuk mempengaruhi atau mengubah jadwal rapat dewan komisaris. Komite CSR mungkin mengusulkan agenda atau topik keberlanjutan untuk dibahas dalam rapat, tetapi keputusan akhir mengenai topik keberlanjutan dibahas atau tidak dalam rapat tetap pada dewan komisaris.

SIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi apakah karakteristik dewan komisaris memiliki pengaruh terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan yang dimoderasi oleh komite CSR pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman ringan. Berikut beberapa kesimpulan dari penelitian yang diperoleh dari hasil pengujian dan analisis data yang telah diinterpretasikan.

Dewan komisaris independen dan frekuensi rapat dewan komisaris ditemukan tidak memiliki pengaruh terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan. Sedangkan, ukuran dewan komisaris dan dewan komisaris perempuan memiliki pengaruh terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan. Selain itu, komite CSR tidak mampu memperkuat pengaruh karakteristik dewan komisaris terhadap kualitas pengungkapan keberlanjutan. Keterbatasan yang ditemukan pada penelitian ini adalah tidak semua perusahaan yang dijadikan sampel dalam penelitian ini memiliki komite CSR.

Saran atau rekomendasi untuk penelitian sejenis kedepannya, yaitu memperluas sampel perusahaan sektor lain yang memiliki komite CSR, dan mencari aturan OJK tentang kehadiran komite CSR dalam perusahaan. Peneliti berikutnya dapat mencari variabel independen lain yang terkait dengan karakteristik dewan komisaris, seperti pengalaman CEO, dualitas CEO, usia, tingkat pendidikan, dan latar belakang budaya, yang diperkirakan dapat mempengaruhi kualitas pengungkapan keberlanjutan.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

DAFTAR PUSTAKA

- Algifari. (2003). *Statistika Induktif Untuk Ekonomi dan Bisnis (2nd ed)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Algifari. (2010). *Statistika Deskriptif Plus untuk Ekonomi dan Bisnis (1st ed)*. Yogyakarta: Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Baroroh, N., Anisykurlillah, I., Yanto, H., & Kusumaningrum, F. (2022). The Influence of Inventory Turnover, Growth, and Independent Commissioners on Sustainability Reports With the Type of Industry as a Moderating Variable. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, 14(2),126-137. <https://doi.org/10.15294/jda.v14i2.38797>
- Elkington, J. (1997) *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century*. Business Oxford: Capstone Publishing Lnt.
- Endrikat, J., Villiers, C. d., Guenther, T. W., & Guenther, E. M. (2020). Board Characteristics and Corporate Social Responsibility: A Meta-Analytic Investigation. *SAGE Open Journal* , 1-37.
- Fama E dan Jensen MC (1983). Masalah Keagenan dan Klaim Sisa. *Jurnal Hukum dan Ekonomi*, 26(2), 327-349.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 29 (9th ed)*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Greenpeace. (2023). *Unilever menjual 1.700 plastik sachet yang mencemari lingkungan setiap detiknya*. <https://www.greenpeace.org/indonesia/siaran-pers/57663/laporan-greenpeace-terbaru-unilever-menjual-1-700-plastik-sachet-yang-mencemari-lingkungan-setiap-detiknya/>.
- GRI. *Pedoman Pelaporan Keberlanjutan, Inisiatif Pelaporan Global*, London. <http://www.globalreporting.org>. Diakses Tanggal 05 Mei 2024.
- Hamad, S., Draz, M. U., & Lai, F.-W. (2020). The Impact of Corporate Governance and Sustainability Reporting on Integrated Reporting: A Conceptual Framework. *SAGE Open Journal*, 1-15.
- Heriansyah, K., & Faradiza, S. (2023). The Effect Of Good Corporate Governance, Profitability, And Company Activities On The Disclosure Of Sustainability Report. *Jurnal Multidisiplin Sahombu*, 2(2), 48-57. <https://doi.org/10.58471/jms.v2i2.1350>
- Hidayah, N., Badawi, A., & Nugrorho, L. (2019). Factors Affecting The Disclosure Of Sustainability Reporting. *International Journal of Commerce and Finance*, 219-229.

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

- Jasman, Wijayanti, I., Mawardi, R., & Wibisono, O. (2023). The Effect of Board Size, Board Independence, Board Diversity and CSR Committee on Sustainability Reporting . *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 5705-5711.
- Jensen, M, dan Meckling, W. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Cost and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 308–309.
- Klikkiri. (2023). *Puluhan Tahun PT Vale Eksploitasi Blok Sorowako: 'Hanya Meninggalkan Kemiskinan Ekstrem'*. <https://klikkiri.co/2023/01/30/puluhan-tahun-pt-vale-eksploitasi-blok-sorowako-hanya-meninggalkan-kemiskinan-ekstrem/>.
- Kolk, A. (2004). A decade of sustainability reporting: Developments and significance. *International Journal of Environment and Sustainable Development*, 3(1), 51-64
- Kolsi, M. C., & Muqattash, R. (2020). Board Characteristics, Ownership Structure and Corporate Social Responsibility Disclosures: Evidence from ADX-Listed Companies. *The IUP Journal of Corporate Governance*, 8-31.
- Komite Nasional Tata Kelola Kebijakan (KNKG). (2006). Pedoman Umum GCG Indonesia, Jakarta.
- Kompas. (2024). *Laporan keberlanjutan punya peran penting buat perusahaan*. <https://lestari.kompas.com/read/2024/01/28/060000586/laporan-keberlanjutan-punya-peran-penting-buat-perusahaan>.
- Mujiani, S., Ahmar, N., & Darmansyah. (2021). The Moderating Role Of Profitability On Good Corporate Governance And Sustainability Report Disclosure. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 1382-1396.
- Munandar, M. R., & Setiawati, E. (2022). The Effect of Profitability, Company Size, Board of Commissioners, Audit Committee and Institutional Ownership on the Disclosure of Sustainability Reports (Empirical Study of LQ45 Index Companies Listed on the Indonesia Stock Exchange Consecutive Years 20. *American Journal of Sciences and Engineering Research*, 119-129.
- Orbaningsih, D., Lisa, O., Muawanah, U., & Cipta, C. D. (2022). The Effect of Good Corporate Governance (GCG) and Corporate Social Responsibility (CSR) Disclosure on Company Value with Profitability as Moderating Variables. *Journal of Economics, Finance and Management Studies*, 1309-1342.
- Puspasari, N. K., & Sujana, I. K. (2021). The Effect of Corporate Social Responsibility Disclosure and Board Remuneration on Financial Performance with the Presence of Woman in the Good Corporate

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Governance Structure. *American Journal of Humanities and Social Sciences Research*, 637-642.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten Atau Perusahaan Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Jasa Keuangan, Institusi, Emiten dan Perusahaan Publik.

Perusahaan yang Listed di BEI. (n.d.). <https://www.idx.co.id/id>

Putri, A. G., Fauzi, M. A., Suratman, S., & Herdiansyah, E. (2022). The Effect Of Profitability, Company Size, Board Of Commissioners, And Audit Committee On Sustainability Report Disclosure. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, 6(2), 48-59. <https://doi.org/10.30738/ad.v6i2.13142>

Rahman, N. O., Savitri, E., & Silfi, A. (2023). The Influence of Foreign Ownership, Environmental Certification, Women's Board of Directors on Disclosure of Corporate Social Responsibility. *Indonesian Journal Of Economics, Social, And Humanities*, 223-239.

Sari, I. A., & Andreas, H. H. (2019). Pengaruh Pengungkapan Sustainability Reporting terhadap. *International Journal of Social Science and Business*, 3(3), 207-214. <https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/IJSSB/index>

Setiawan, E. M., & Ridaryanto, P. (2022). Analisis Pengaruh Efektivitas Dewan Komisaris Dan Komite Audit Terhadap Kualitas Sustainability Report. *Jurnal Akuntansi, Auditing dan Keuangan*, 126-149.

Sonia, D., & Khafid, M. (2020). The Effect of Liquidity, Leverage, and Audit Committee on Sustainability Report Disclosure with Profitability as a Mediating Variable. *Accounting Analysis Journal*, 96-102.

Subiyakto, H., & Algifari. (2011). *Praktikum Statistika dengan Ms. Excel dan SPSS*. Yogyakarta: STIE YKPN Yogyakarta.

Sugiyono. (2019). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Subarkah, J. (2021). The Effect Of Characteristics Good Corporate Governance On Area Of Corporate Social Responsibility Disclosure. *International Journal of Economics, Bussiness and Accounting Research*, 1-8.

Suryana, I. M., & Setiany, E. (2022). Effect of Stakeholder Pressure and Corporate Governance on Sustainability Reports. *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, 5(2), 59-67. <https://doi.org/10.32996/jefas.2023.5.2.6>

Tobing, R. A., Zuhrotun, & Rusher Listyani. (2019). Pengaruh Kinerja Keuangan, Ukuran Perusahaan, dan Good Corporate Governance Terhadap Pengungkapan Sustainability Report pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia. *European Journal of Business and*

PLAGIASI MERUPAKAN TINDAKAN TIDAK TERPUJI

Management Research, 3(1), 102-123.
<https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.4.929>

Trisnawati, R., Wardati, S. D., & Putri, E. (2022). The Influence of Majority Ownership, Profitability, Size of the Board of Directors, and Frequency of Board of Commissioners Meetings on Sustainability Report Disclosure. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Indonesia*, 7(1), 94-104. <http://journals.ums.ac.id/index.php/reaksi/index>.

Undang undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (PT).

Wahyudi, S. M. (2021). The Effect of Corporate Governance and Company Characteristics on Disclosure of Sustainability Report Companies. *European Journal of Business and Management Research*, 6(4), 94-99. <https://doi.org/10.24018/ejbmr.2021.6.4.929>

Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* (2nd ed.). The MIT Press.

